

Ketimpangan arus informasi antara pemerintah dan masyarakat (Analisis isi berita ekonomi bulan Januari - Maret 1988 pada Harian Kompas)

Alberthus Baha Rebong, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20283245&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian tentang ketimpangan arus informasi antara pemerintah dan masyarakat dalam harian Kompas dilakukan: dengan melihat proporsi berita (yang berisi informasi/pendapat dari atas dan dari bawah). Titik tolak yang lain adalah dengan melihat prioritas yang diberikan oleh surat kabar tentang dua pihak komunikasi, yakni pemerintah dan masyarakat. Hal ini dianggap berhubungan erat dengan trend demokrasi komunikasi dalam presentasi isi surat kabar. Di dalam analisa yang dikerjakan selama tiga bulan (Januari - Februari - Maret 1988) Kompas menunjukkan keterpusatan yang semakin lama semakin besar pada pemerintah. Pada bulan Januari, misalnya, Kompas terlibat cukup bijaksana menempatkan unsur pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pemberitaannya. Dalam dua bulan berikutnya, Kompas mulai mengendor dalam berita-berita dari masyarakat dan hanya terpusat pada pemerintah. Berita-berita yang berasal dari pemerintah umumnya berisi ketetapan/keputusan dan instruksi yang seolah-olah dilepaskan ke dalam alam vacuum tanpa masalah. Tidak terlihat kaitan-kaitan pemberitaan di mana dapat dibaca unsur 'diskusi' di dalamnya. Kompas terlihat tidak berusaha menggali tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Dan kalau pun ada, tidak diperlihatkan Kompas dalam pemberitaan pemberitaannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan arus informasi dalam presentasi isi surat kabar Kompas. Dan dalam ,tiga bulan ini dapat disebut sebagai gejala yang ditampilkan Kompas. Mengapa ketimpangan itu terjadi? Pertama-tama yang dilihat dalam analisa ini adalah posisi dan unsur pemerintah, pers dan masyarakat, mengikuti ideal interaksi positif antara ketiganya. Pemerintah yang mendominasi arus informasi berdasarkan persektif politik, memang berada pada posisi yang kuat karena ia mampu mengatur kehidupan pers. Dalam perspektif pers pembangunan, pers diharapkan melancarkan program-program pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Fungsi ini positif; disatu pihak dan negatif di lain pihak. Positif karena pers dapat menciptakan ide-ide yang sama tentang pembangunan, tetapi negatif dalam arti ia mematikan sikap kritis pers dan pers lalu kehilangan fungsi kontrolnya. Kompas dalam hal ini cenderung mengutamakan pemerintah karena secara historis dapat dilihat bahwa arahnya adalah "government centris. Analisa yang pernah dilakukan oleh Sinansari Ecip menunjukkan kecenderungan keterpusatan dan tahun ketahun Soal berikutnya adalah berkembangnya Kompas menjadi sebuah perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan ini membuatnya ekstra hati-hati terhadap pemerintah yang dapat menentukan keberlangsungan hidupnya. Hal berikutnya menyangkut kesiapan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam ajang diskusi masalah-masalah bersama. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mencapai tingkat pendidikan yang memadai yang justru merupakan kendala bagi peran sertanya dalam komunikasi. Hubungan tingkat pendidikan dengan antisipasi komunikasi dapat dilihat dalam analisa ini bahwa, pada umumnya hanya golongan masyarakat tertentu yang mempunyai akses terhadap informasi/komunikasi. Pada umumnya hanya golongan yang sudah mengenyam tingkat pendidikan yang cukup saja yang dapat 'berbicara' melalui media masa. : Masih tentang masyarakat adalah apa yang disebut cultural barrier'. Budaya masyarakat yang mengagungkan orang-orang yang lebih

tinggi memberikan kontribusinya pada pola ketimpangan arus informasi dalam surat kabar, sebagaimana ditampilkan Kompas, berdasarkan analisa yang dikerjakan ini